

## **Pengaruh Motivasi Kerja dan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan atas Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Makassar**

Dian Kurniaawan

Email : [diankurniawan@gmail.com](mailto:diankurniawan@gmail.com)

Mahasiswa Prodi Akuntansi STIEM Bongaya Makassar, Indonesia

Andi Patiware

Email : [patiware@gmail.com](mailto:patiware@gmail.com)

Dosen Prodi Akuntansi STIEM Bongaya Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

**Nama author** : Dian Kurniawan

**E-mail** : [diankurniawan@gmail.com](mailto:diankurniawan@gmail.com)

*Received; 20 Juni 2023, Revised ; 23 Juni 2023, Accepted 28 Juni 2023,  
Published 21 Agustus 2023*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan Dalam Pengelolaan Pendapatan Bukan Pajak (Pnbp) Dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Makassar baik secara bersama-sama (simultan) maupun secara individu (parsial). Responden dalam Penelitian ini adalah pegawai pada Dinas Koperasi Kota Makassar. Berdasarkan metode penelitian kuantitatif, total sampel dalam penelitian ini adalah 44 responden. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 44 eksemplar. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Motivasi Kerja dan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan pada kantor Dinas Pemerintah Kota Makassar.

**Kata Kunci** : Motivasi Kerja, Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan dan Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan.

**Abstract:** This study aims to examine the effect of work motivation on the implementation of the financial management function in the management of non-tax revenue (PNBP) and its impact on the implementation of financial accountability for the government of Makassar City both jointly (simultaneously) and individually (partially). Respondents in this study were employees at the Makassar City Cooperative Service. Based on quantitative research methods, the total sample in this study was 44 respondents. In this study using primary data obtained from distributing questionnaires. The number of questionnaires distributed was 44 copies. The analytical method used in this study is multiple regression.

The results of this study indicate that Work Motivation and the Implementation of the Financial Management Function simultaneously have a positive and significant effect on the Implementation of Financial Accountability at the Makassar City Government Office.

**Keywords:** Work Motivation, Implementation of Financial Management Functions and Implementation of Financial Accountability

## I. PENDAHULUAN

Reformasi dalam tata kelola pemerintahan terutama dalam pengelolaan keuangan mengharuskan pengelola keuangan agar dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana untuk pelaksanaan program/kegiatan. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) organisasi pemerintah diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas yang merupakan pondasi dari proses pemerintahan. Memberikan pelayanan yang baik, mengelola keuangan dengan baik dan mempertanggungjawabkan dana yang terhimpun merupakan perwujudan akuntabilitas pemerintah.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban ( LAN – RI tahun 2003 ). Dengan adanya pelaksanaan akuntabilitas diharapkan pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan kinerja yang baik sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

Pelaksanaan fungsi manajemen keuangan dimaksudkan agar dalam pengelolaan keuangan dapat memenuhi prinsip – prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan PNBPN fungsi manajemen meliputi perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pengawasan. Pada pemerintah pelaksanaan fungsi manajemen keuangan sudah lama diterapkan namun dalam pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya. Manajemen keuangan belum memenuhi prinsip – prinsip transparansi dan akuntabilitas yang disebabkan karena masih terkendala dengan sistem manajemen keuangan yang berlaku saat ini. Perwujudan pelaksanaan fungsi manajemen keuangan didukung oleh adanya motivasi kerja dari aparatur yang mengelola keuangan. Menurut Siagian ( 2002 : 102 ) motivasi adalah daya pendorong bagi seseorang untuk memberikan kontribusi yang sebesar mungkin demi keberhasilan organisasi mencapai tujuannya. Dengan pengertian, bahwa tercapainya tujuan organisasi berarti tercapai pula tujuan pribadi para anggota organisasi yang bersangkutan.

Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan (Hasibuan 2003 : 141 ). Motivasi dapat diciptakan dengan mengadakan pengaturan kerja yang baik, sehingga menimbulkan motivasi kerja bagi aparatur yang menyebabkan mereka mau mengerahkan kemampuan yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya motivasi kerja dari aparatur tentunya pelaksanaan fungsi manajemen keuangan akan dapat diwujudkan.

Jika penghargaan atas prestasi kerja belum tersedia secara memadai tentunya motivasi kerja aparatur pengelola keuangan tidak sepenuhnya dapat diharapkan sesuai keinginan. Hal ini akan mempengaruhi pada pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana pelaksanaan fungsi manajemen keuangan yang baik dapat terlaksana dengan diberikan pelatihan yang memadai dan penghargaan berupa finansial sehingga mendorong motivasi kerja aparatur untuk melaksanakan

pelaksanaan fungsi manajemen keuangan yang baik dan juga akan berdampak pada peningkatan pelaksanaan akuntabilitas keuangan.

Adapun fenomena yang saya temukan pada Pemerintah Kota Makassar melaporkan bahwa ada 2 Instansi Pemerintahan yang masih kurang dalam menerapkan akuntabilitas kinerja di instansinya sepanjang 2011. Deputi bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur Pemerintah Kota Makassar mengungkapkan dari 4 instansi/dinas yang menyerahkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) 2011 dengan tepat waktu, masih terdapat 6 instansi yang mendapat predikat 'C' alias agak kurang dan memerlukan banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar. Namun secara umum, evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Makassar lebih baik dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya, meskipun dari 15 instansi pemerintah kota Makassar hanya 2 yang mengajukan LAKIP tepat waktu untuk di evaluasi pemerintah kota Makassar.

## II. LITERATUR REVIEW

### 1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Menurut Mardi Priyatno (2007) pengertian dari PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) adalah salah satu komponen anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai bagian dari pendapatan/penerimaan Negara. Contoh : Penerimaan Negara bukan pajak dan penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri serta penerimaan perpajakan.

### 2. Pelaksanaan Akuntabilitas

Menurut Stanbury (2003) dalam Mardismo (2006) akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan akuntabilitas oleh pengelola keuangan pada pemerintah kota Makassar diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan harus diterapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Menurut komite penyempurnaan Manajemen Keuangan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 2006 tentang : Pelaporan Keuangan kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Keuangan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara selama satu periode. Adapun indikator dari pelaksanaan akuntabilitas sebagai berikut : (a). Laporan Realisasi Anggaran, merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. (b) Neraca, yakni laporan menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan atau entitas bisnis tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. (c) Catatan atas laporan keuangan, adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut.

### 3. Motivasi Kerja

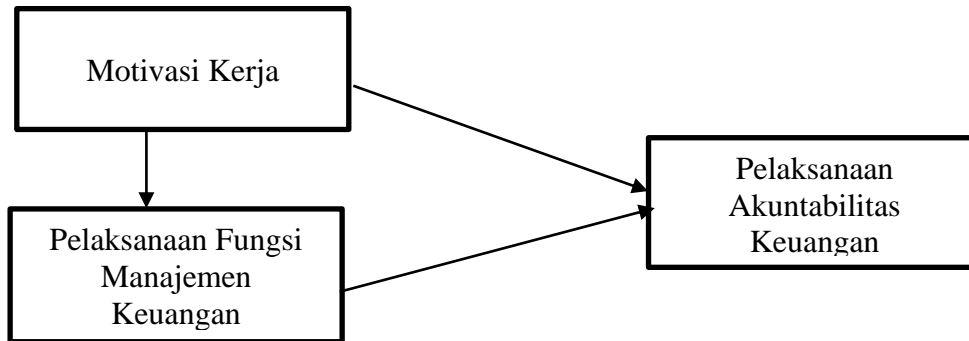
Motivasi kerja merupakan suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri seorang manusia yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang dapat dipengaruhi hasil kinerjanya secara positif. Menurut Gitosudarmo (1986:77) dalam Mardismo (2006) motivasi atau dorongan kepada karyawan untuk bersedia bekerja sama demi tercapainya tujuan bersama, terdiri dari : (a) Motivasi finansial yaitu dorongan yang dilakukan dengan memberikan imbalan finansial kepada karyawan. Imbalan tersebut sering disebut Insentif; (b) Motivasi non finansial yaitu dorongan yang diwujudkan tidak dalam bentuk finansial, akan tetapi berupa hal-hal seperti pujian, penghargaan, pendekatan manusiawi dan lain sebagainya.

Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan (Hasibuan, 2003:141). Tercapainya tujuan organisasi berarti tercapai pula tujuan pribadi para anggota organisasi yang bersangkutan (Siagian, 2002:102). Motivasi kerja aparatur dalam pengelolaan keuangan perlu ditingkatkan untuk menghasilkan produktifitas yang sesuai dengan harapan pribadi dan tujuan organisasi. Hal ini dimaksudkan agar aparatur pengelola keuangan dapat melaksanakan akuntabilitas keuangan dengan baik. Aparatur yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi akan dapat melaksanakan melaksanakan akuntabilitas keuangan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### 4. Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan

Pelaksanaan fungsi manajemen keuangan pada pemerintah kota Makassar diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan SAP dan mengikuti ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi manajemen keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara menyatakan bahwa pengelolaan mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban, dimaksudkan agar dapat mewujudkan pelaksanaan akuntabilitas yang baik dalam proses pengelolaan keuangan. (a) Tujuan Manajemen Keuangan; Tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap asset yang dimiliki oleh pemegang saham. (b) Fungsi Manajemen Keuangan, terdiri dari : (1).Planning atau perencanaan keuangan, meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. (2) Budgeting atau anggaran, perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. (3) Controlling atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. (4) Auditing atau pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. (5) Reporting atau pelaporan keuangan, menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan p

## Kerangka Konsep



**Gambar 1:** Bagan Kerangka Pikir

## B. Hipotesis

- H1 : Motivasi kerja berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas keuangan pada pemerintah kota Makassar.
- H2 : Pelaksanaan fungsi manajemen keuangan berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas keuangan pada pemerintah Kota Makassar.

## III. METODOLOGI

### Metode

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014: 8). Dengan jenis penelitian, penelitian eksplanatif, yaitu penelitian yang bertujuan menguji ada pengaruh variable independen terhadap variable dependen.

Penelitian yang dilakukan pada Dinas Pemerintah kota Makassar yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Sampel penelitian adalah pejabat dan pegawai pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar berjumlah 44 orang, terdiri dari Kepala Dinas 1 orang, Sekretaris Dinas 1 orang, Kepala Bagian 5 orang, Bendahara 1 orang dan Staf sebanyak 36 orang. Teknik pengumpulan menggunakan kuesioner dimana jumlah kuesioner yang disebar dan diolah sebanyak 44 kuesioner.

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan

X1 = Motivasi Kerja

X2 = Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan

a = konstanta

b = koefisien regresi

e = random error

## Hasil

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa koefisien regresi, nilai t dan signifikansi secara adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Uji Hipotesis

Uraian	Koofisien Regresi	t- hitung	p-value (sig)
Constant	3,473	0,772	0,445
Motivasi Kerja (X1)	0,416	2.299	0,028
Fungsi Manaj.Keu. (X2)	0,381	2,738	0,010
Dependen Variabel : Akuntabilitas Keu. (Y)	-	-	-

Sumber : Data diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil penelitian Uji t dapat dilihat pada tabel diatas yaitu pada nilai t dengan nilai  $df = n-k-1$ ,  $37-2-1=34$  maka t tabel di peroleh 2,026. Pada tabel 1 nilai Motivasi Kerja pada kolom t sebesar 2,299, nilai thitung lebih besar dari ttabel yaitu  $2,299 > 2,026$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima berarti Motivasi Kerja berpengaruh positif terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan. Sedangkan nilai Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan pada kolom t sebesar 2,738, nilai thitung lebih besar dari ttabel yaitu  $2,738 > 2,026$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima berarti Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan berpengaruh positif terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan. Dari hasil perhitungan ini, dapat pula diperoleh bahwa antara Motivasi Kerja terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan terdapat pengaruh positif dan signifikan ( $\alpha = 0,05$ ) dengan nilai signifikan diperoleh sebesar 0,028 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan pengaruh positif dan signifikan ( $\alpha = 0,05$ ) dengan nilai signifikan diperoleh sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05. Terdapat pengaruh Motivasi Kerja terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan. Pengaruh yang diperoleh adalah secara positif dan signifikan.

#### IV. PEMBAHASAN

##### 1. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan akuntabilitas keuangan. Artinya semakin tinggi tingkat Motivasi Kerja pegawai, maka semakin tinggi juga tingkat pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan.

Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan (Hasibuan, 2003:141). Tercapainya tujuan organisasi berarti tercapai pula tujuan pribadi para anggota organisasi yang bersangkutan (Siagian, 2002:102). Motivasi kerja aparatur dalam pengelolaan keuangan perlu ditingkatkan untuk menghasilkan produktifitas yang sesuai dengan harapan pribadi dan tujuan organisasi. Hal ini dimaksudkan agar aparatur pengelola keuangan dapat melaksanakan akuntabilitas keuangan dengan baik. Hasil penelitian Tjahjo dan Gunarsih (2008) ini sesuai dengan penelitian ini yang menyatakan Motivasi kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.

##### 2. Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan Terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan

Sedangkan pengaruh Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan. Pengaruh yang diperoleh adalah positif dan signifikan. Artinya semakin tinggi tingkat Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan, maka semakin tinggi juga tingkat pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan.

Pelaksanaan fungsi manajemen keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara menyatakan bahwa pengelolaan mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban, dimaksudkan agar dapat mewujudkan pelaksanaan akuntabilitas yang baik dalam proses pengelolaan keuangan. Hasil penelitian Alfi Syahril Fuadi Jaya (2011) ini sesuai dengan penelitian ini yang menyatakan motivasi kerja dan pelaksanaan fungsi manajemen secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan akuntabilitas keuangan.

#### V. KESIMPULAN

**Kesimpulan.** (a) Motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan akuntabilitas keuangan (b) Pelaksanaan fungsi manajemen keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan akuntabilitas keuangan

**Keterbatasan.** Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menambah variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini yang mempengaruhi pelaksanaan akuntabilitas keuangan.



---

## REFERENSI

- Artjana (2002), Upaya Membangun Akuntabilitas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Lingkungan Militer Menuju Terciptanya Good Governance Tantangan dan Harapan, <http://www.go.id>. down load tanggal 6 April 2008.
- BPKP (2007), Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Edisi Keempat. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2005), Peraturan Nomor : 02/PB/2005, Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Pendapatan Dan Belanja Negara, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Effendi (2006), Kendala dalam Penerapan Ketentuan dalam PNBPN dan Penetapan Aset Tetap Universitas Gajah Mada. [sofian.staff.ugm.ac.i/---/kendala-dalam-penerapanPNBPN.pdf](http://sofian.staff.ugm.ac.i/---/kendala-dalam-penerapanPNBPN.pdf).
- Gitosudarmo, Indriyo, 1986. Prinsip Dasar Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Melayu SP (2003) Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Handoko, Martin (1992), Motivasi Daya Penggerak Tingkah Laku. Yogyakarta : Kanisius.
- Islamy, Irfan (2001), Agenda Kebijaksanaan Reformasi Administrasi Negara, Jurnal Administrasi Negara Vol. II, No. 1, September 2001 : 13-30.
- Kementerian Pendidikan Nasional (2010), Sistem Informasi Manajemen Keuangan Kemendiknas.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005), Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (2006), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2005 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- LAN RI (2003), Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta.
- Li,Ching Chun (1975), Path Analysis : A Primer. Pacific Grove, CA : Boxwood Press.
- Mardiasmo (2006), Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol.2 No.1 Mei 2006 : halaman 1-17.



Sandra, Ria dan Fidelis Arastyo (2004), Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah XYZ Dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat, JAKSP, Vol.05, N0.02, Agustus 2004.

Siagian, Sondang P. 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: Rineka Cipta.

Scermerhorn (2005), Management, 8 th Edition, New York : John Wiley and Sons.